

**PENGARUH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATU TUF TERHADAP**

**PENINGKATAN KESEJAHTERAN MASYARAKAT**

**KABUPATEN WONOGIRI**

**NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna  
mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Disusun Oleh:

TITO SEPRIADI

NIM.C.100.100.075

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2015**

## HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Prof. Dr. Harun, S.H., M.H)

Pembimbing II

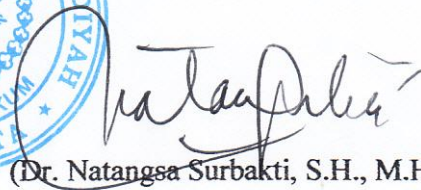


(Jaka Susila, S.H., M.Si)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

**PENGARUH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATU TUF TERHADAP  
PENINGKATAN KESEJAHTERAN MASYARAKAT  
KABUPATEN WONOGIRI**

**Tito Sepriadi**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Surakarta**  
**2015**  
**E-mail: titoadi@rocketmail.com**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Wonogiri; (2) Pengaruh Izin Usaha Pertambangan Batu Tuf terhadap Peningkatan Kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Wonogiri apakah telah sesuai peraturan perundang-undangan nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara; (2) Pengaruh Izin Usaha Pertambangan Batu Tuf terhadap Peningkatan Kesejahteraan masyarakat, dengan di izinkan nya pertambangan Batu Tuf tersebut apakah mempunyai pengaruh peningkatan kesejahteraan masyarakat Wonogiri.

*Kata Kunci: Pengaruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Tuf Terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Wonogiri, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara*

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine: (1) To determine the Implementation of Mining Permit Application (IUP) in Wonogiri; (2) Effect of Mining Permit Stone Tuff against Improved Welfare society. This research is descriptive research. Data were analyzed using qualitative analysis. The results showed that: (1) Implementation of Application Mining Permit (IUP) in Wonogiri whether it has appropriate laws and regulations number 4 of 2009 on mineral and coal mining; (2) Effect of Mining Permit Stone Tuff against Improved Welfare society, with its authorized tuff stone mining is whether it has the effect of an increase in welfare of society Wonogiri.

*Keywords: Effect of Mining Permit Stone Tuff against Improved Welfare society Wonogiri , laws and regulations number 4 of 2009 on mineral and coal mining*

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum modern atau yang sering disebut dengan *Welfarestate* (Negara Kesejahteraan) harus mampu mewujudkan kesejahteraan warga negaranya dengan ikut campur tangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat.<sup>1</sup> Dalam Negara kesejahteraan pemerintah mengambil peran aktif dalam mewujudkan kehidupan ekonomi masyarakat agar terjadi distribusi kekayaan secara merata kepada seluruh masyarakat.

Dalam hal ini maka diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri di dalam memberikan segala bentuk perizinan nantinya harus memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan masyarakat. Hukum perizinan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, yang keberadaannya berguna dan tidak menimbulkan bahaya terhadap kehidupan. “Apabila dalam aktivitasnya terdapat penyimpangan maka akan terdeteksi oleh publik secara melembaga dan tersedia mekanisme kontrol, serta bertanggungjawab”.<sup>2</sup>

Keadaan alam Kabupaten Wonogiri yang berupa gunung dan perbukitan menjadikan Kabupaten Wonogiri memiliki potensi bahan galian mineral yang cukup besar baik logam maupun non logam.<sup>3</sup> “Bahan galian mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk oleh alam memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu”.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Aidul Fitriciada Azhari, 2009, *Bahan Ajar Ilmu Negara*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.6

<sup>2</sup>Harun, 2012, *Kontruksi Perizinan Usaha Industri Prospektif*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 35

<sup>3</sup>Sutrisno, 2012, *Buku Pintar Wonogiri*, Wonogiri: Bagian Humas Kabupaten Wonogiri

<sup>4</sup>PESDM, 2013, *Handout Dinas Pengairan Energi Sumber Daya Mineral*, Wonogiri: Dinas Pengairan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Wonogiri, hal.20

Warga masyarakat Wonogiri banyak yang melakukan kegiatan pertambangan, terutama pertambangan batuan jenis batu Tuf karena batu Tuf mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Lokasi pertambangan batuan Tuf di Kabupaten Wonogiri terdapat di wilayah Kecamatan Wonogiri, Kecamatan Wuryantoro dan Kecamatan Nguntoronadi. Bertambahnya penduduk dan adanya perkembangan di sektor lain, maka dengan sendirinya berdampak pada pemanfaatan bahan galian.<sup>5</sup>

Dalam mengantisipasi eksplorasi yang berlebih harus ada kontrol masyarakat atau pemerintah melalui izin. Menurut Sjachran Basah: “Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>6</sup>

Hal-hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu.<sup>7</sup> Batu Tuf adalah satu jenis batuan vulkanik, yang biasanya berasosiasi dengan batu apung sehingga berat jenisnya relatif kecil dibanding dengan batuan yang lain. Batu Tuf sering dimanfaatkan untuk tungku, giring, tanah urug dan furniture.<sup>8</sup>

Pengertian pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi arti

---

<sup>5</sup> Sutrisno *Op.Cit*, hal. 20

<sup>6</sup> Sjachran Basah, 1995, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Surabaya: FH UNAIR, hal.4

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 168

<sup>8</sup> Dinas PESDM, 2013, *Laporan Sumberdaya Mineral Kabupaten Wonogiri*, Wonogiri: Dinas PESDM, hal.8

dari tambang tempat terjadinya kegiatan penambangan.<sup>9</sup> Sedangkan penambangan adalah proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi.<sup>10</sup>

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini: (1) Bagaimana pelaksanaan permohonan izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Wonogiri? (2) Apakah pengaruh izin usaha pertambangan batu Tuf terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat?

Tujuan penelitian ini: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan permohonan izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Wonogiri. (2) Untuk mengetahui pengaruh izin usaha pertambangan batu Tuf terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Manfaat penelitian ini: (1) Dapat memberikan pendapat tentang perkembangan teori hukum terkait dengan perizinan usaha pertambangan. (2) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral di Kabupaten Wonogiri.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang lebih

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hal.23

<sup>10</sup>*Ibid*, hal.25

menekankan pada ilmu hukum dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Wonogiri**

Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut maka pembahasan mengenai para pelaku usaha pertambangan dalam mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

Aturan norma, Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara serta Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Di Kabupaten Wonogiri.

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian, pengakutan dan penjualan. Sedangkan Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

---

<sup>11</sup>Jhony Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyu Media, hal 107

Berdasarkan pada aturan atau norma tersebut dapat disimpulkan dalam hal ini pemerintah berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan peran serta masyarakat juga dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Di Kabupaten Wonogiri dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.

Dasar Hukum Pemberian Izin Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral di Kabupaten Wonogiri menjadikan dasar dikeluarkannya izin usaha pertambangan di Kabupaten Wonogiri setelah menimbang Pasal 16, yang pada intinya bahwa wewenang dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Wonogiri menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya mineral di wilayah Kabupaten Wonogiri, maka Peraturan Daerah dibuat oleh Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD Wonogiri sebagai produk hukum.

Pelaku usaha tambang Batu Tuf di Kabupaten Wonogiri yang akan melakukan kegiatan pertambangan, setelah penulis melakukan penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa para pelaku usaha tambang tersebut sudah sesuai melakukan kegiatan yang bersifat *legal* karena telah melakukan serangkaian kegiatan yang telah dipenuhi sebagai syarat dikeluarkannya izin oleh Bupati Wonogiri dan mendapat rekomendasi teknis dari Gubernur Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa para pelaku usaha tambang batu Tuf dalam melakukan kegiatannya sudah sesuai



dengan dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral di Kabupaten Wonogiri yang nantinya dapat diberikan atau ditolak permohonan izinnya oleh Bupati Wonogiri.

Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan Setelah melalui Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan kegiatan tambang tidak terlalu besar dampaknya terhadap kerusakan lingkungan serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, maka para pelaku usaha tambang harus mengajukan permohonan, untuk mendapatkan Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*). Syarat untuk mendapatkan izin HO yakni mengisi formulir permohonan secara lengkap bermaterai Rp 3.000,- dengan melampirkan. Waktu penyelesaian maksimal 14 hari kerja setelah persyaratan dipenuhi.

“Izin HO (*Hinder Ordonantie*) yang sering di sebut izin gangguan hanya semacam hukum tetangga karena jangkauan teritorialnya terbatas pada jarak 200 meter dari tempat usaha yang bersangkutan, Izin HO terbatas oleh Pemerintah kabupaten sedangkan pencemaran atau kerusakan lingkungan tidak mengenal Wilayah dan HO merupakan ordonasi yang sifatnya individual karena ditunjukkn pada gangguan yang ditimbulkan oleh perusahaan secara mandiri dan tidak pada beban derita yang ditimbulkan karena pencemaran secara kolektif.”<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan Batu Tuf tidak hanya berdampak disekitar tambang namun dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh warga masyarakat Wonogiri bahkan warga masyarakat di luar Kabupaten Wonogiri, karena wilayah pertambangan Batu Tuf di daerah sabuk hijau, maka usaha pertambangan tidak hanya

---

<sup>12</sup>Absori, 2009, *Hukum Penyelesaian Lingkungan Hidup*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 31

dilengkapi izin HO namun harus dilengkapi juga dengan Izin Usaha Pertambangan, karena Izin Usaha Pertambangan ini lebih luas jangkauannya dari pada Izin HO.

### **Analisis Pengaruh Izin Usaha Pertambangan Batu Tuf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Wonogiri**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batu Bara pada Pasal 3 yang juga menjadi tujuan pengelolaan sumber daya mineral mengamanatkan Dalam rangka mendukung pembangaunan yang berkesinambungan tujuan pengelolaan pertambangan mineral adalah meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan menjamin kepastian hukum dan penyelegaran kegiatan usaha pertambangan mineral.

Tujuan Hukum Perizian untuk Mewujudkan Kesejahteraan Hukum perizinan merupakan salah satu cakupan dari Hukum Administrasi Negara yang memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi normatif fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Fungsi normatif merupakan fungsi yang dilakukan pemerintah dalam hal penormaan atau pembuat aturan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah memenuhi tiga fungsi hukum perizinan, yaitu fungsi normatif, fungsi instrumental, fungsi jaminan.

Fungsi instrumental merupakan fungsi pemerintah dalam rangka pelaksana aturan hukum. Fungsi jaminan merupakan fungsi yang dilaksanakan pemerintah sebagai pelindung dan pengayom masyarakat (rakyat) dalam rangka perlindungan hukum sehingga terwujudnya keadilan dan kesejahteraan

masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menerbitkan atau memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Tuf telah memenuhi tiga fungsi hukum perizinan yaitu:

Fungsi normatif sebagai pelaksanaan fungsi normatif pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk melaksanakan fungsi ini selain berdasarkan aturan hukum yang berlaku juga membuat Peraturan Daerah bersama DPRD dan ditindak lanjuti dengan keputusan Bupati, yang mengatur tentang prosedur dan mekanisme Izin Usaha Pertambangan batu Tuf.

Fungsi instrumental sebagai pelaksanaan fungsi instrumental pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk melaksanakan fungsi ini, bupati menunjuk beberapa SKPD terkait untuk memberikan pertimbangan terhadap permohonan Izin Usaha Pertambangan batu Tuf di antaranya. Dinas PESDM, Kantor Lingkungan Hidup, Bagian Perekonomian Setda dan Kantor Pelayanan Terpadu untuk melakukan analisis terhadap permohonan yang selanjutnya dimintakan rekomendasi kepada gubernur, setelah mendapatkan rekomendasi bupati baru memberikan izin.

Fungsi jaminan dalam melaksanakan fungsi ini pemerintah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada pemohon dan masyarakat sehingga terlindungi hak-haknya, terciptanya rasa aman dan tentram dalam melaksanakan kegiatan baik pelaku usaha maupun masyarakat sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menerbitkan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Tuf sudah sesuai dengan tujuan hukum perizinan yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat, karena dengan diterbitkan izin maka masyarakat mempunyai perlindungan hukum, karena ada pengawasan sehingga bahaya yang ditimbulkan dari pertambangan Batu Tuf dapat teridentifikasi dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lokasi tambang yang berada di sekitar sabuk hijau (*green bell*) perlu adanya perlindungan salah satunya dengan izin supaya kegiatan tambang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan atau daya dukung lingkungan disekitar sabuk hijau (*green bell*). Sehingga kegiatan tambang tersebut tidak menimbulkan bahaya dan dapat meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Adanya izin masyarakat merasa aman, tidak hanya bagi pelaku tambang dan masyarakat sekitar tambang yaitu di Kecamatan Ngutoronadi, Kecamatan Wuryantoro dan Kecamatan Wonogiri namun juga seluruh masyarakat baik didalam Kabupaten Wonogiri maupun masyarakat di luar Kabupaten Wonogiri, sehingga rasa aman dapat terpenuhi dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan Masyarakat menurut “Bintarto dapat diukur dari beberapa aspek diantaranya dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya dan dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya”.<sup>13</sup> Kegiatan penambangan Batu Tuf dapat mempengaruhi keadaan alam sehingga kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan oksigen untuk bernafas, air untuk minum, lauk pauk untuk makan serta pakaian (sandang) dan rumah tempat tinggal (papan)

---

<sup>13</sup> Edah Parangwasa, 2001, *Materi Kuliah*, Yogyakarta: Universitas Sanata Darma, hal.44

bisa terganggu, maka dengan adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Tuf dapat mengendalikan eksploitasi yang berlebihan yang berdampak kerusakan kelestarian lingkungan atau ekosistem, sehingga kebutuhan pokok dasar manusia masih terjaga atau terlindungi dengan baik, dengan adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) menimbulkan rasa aman, nyaman dan tentram bisa tercapai karena ada perlindungan hukum dari pemerintah, dengan demikian dapat meningkatkan taraf hidupnya sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Usaha pertambangan Batu Tuf berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, dari segi peningkatan pendapatan ada pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan. Total Produksi Batu Tuf di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2012 sebesar 25.380 m<sup>3</sup> dengan nilai penjualan mencapai Rp 999.540.000, sementara pada tahun 2013 hasil produksi meningkat dengan penjualan sebesar Rp 1.011.420.000, artinya terjadi peningkatan penjualan sebesar 1,42% antara tahun 2012 dan 2013.<sup>14</sup>

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya dalam peningkatan penghasilan atau pendapatan karena terbukanya lapangan kerja namun juga rasa aman dan tentram merupakan bagian dari indikator kesejahteraan, karena apabila masyarakat merasa aman dan tentram maka dalam pemenuhan kebutuhan hidup dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Izin Usaha Pertambangan Batu Tuf di Kabupaten Wonogiri tidak hanya bertujuan

---

<sup>14</sup>Laporan Akhir Neraca Sumber Daya Mineral Kabupaten Wonogiri, 2013, Wonogiri : Dinas Pengairan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Wonogiri, hal. 69.

peningkatan kesejahteraan saat ini saja namun juga untuk peningkatan kesejahteraan dimasa mendatang atau berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu Tuf yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Wonogiri, karena adanya izin rasa aman dapat tercapai sehingga adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini telah sesuai dengan tujuan hukum perizinan yaitu bahwa hukum perizinan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai “Pengaruh Izin Usaha Pertambangan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Wonogiri” maka di dalam bagian ini penulis memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

*Pertama*, pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Batu Tuf dalam hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Tuf di Kabupaten Wonogiri yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Di Kabupaten Wonogiri, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut dan pengajuan permohonan oleh pemohon yang telah memenuhi persyaratan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah sesuai dengan tujuan hukum perizinan untuk mewujudkan kesejahteraan.

*Kedua*, pengaruh Izin Usaha Pertambangan Batu Tuf Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan di terbitkannya IUP Batu Tuf pendapatan pemerintah dan warga masyarakat juga meningkat. Pemberian izin bagi pemerintah dapat digunakan sebagai data awal untuk menghitung pendapatan pemerintah melalui pajak dan restribusi sehingga akan meningkatkan PAD. Dengan kenaikan PAD maka biaya untuk agaran pembangaunan juga meningkat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan.

Bagi pemohon atau masyarakat dengan mendapatkan izin dapat meningkatkan kualitas hidup dari segi materi karena dengan adanya Izin Usaha Pertambangan Batu Tuf maka masyarakat merasa aman sehingga peningkatan kualitas hidup dapat tercapai dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Tuf di Kabupaten Wonogiri telah sesuai dengan tujuan hukum perizinan yaitu mensejahterakan masyarakat.

### **Saran**

Setelah melakukan penelitian ini, maka penulis menyarankan: *Pertama*, para pelaku usaha pertambangan batu Tuf tetap mentaati peraturan yang telah ditentukan. *Kedua*, perlu peningkatan kordinasi antar SKPD (Dinas PESDM, Kantor LH, Bagian Perekonomian Setda dan Kantor Pelayan Terpadu). *Ketiga*, untuk penelitian lebih lanjut penulis sarankan untuk meneliti perizinan selain penambangan batu Tuf, karena di Kabupaten Wonogiri masih ada tambang-tambang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Absori, 2009, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Azhari, Aidul Fitriciada, 2013 *Bahan Ajaran Hukum Tata Negara 1*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS
- Harun, 2012, *Konstruksi Perizinan Usaha Industri Propektif*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS
- Jeddawi, Mutir, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Total Media
- Laporan akhir, 2013, *Neraca Sumber Daya Mineral Kabupaten Wonogiri, kerjasama Dinas Pengairan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Wonogiri dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Surakarta: UNS
- PESDM, *Handout Dinas Pengairan Energi Sumber Daya Mineral*, Wonogiri: Dinas Pengairan dan Sumber Daya Mineral
- Ramadi, Takdir, 2011, *Hukum Likungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sjacharan, Basah, 1995, *Pencabutan Izin sebagai salah satu sanksi Hukum Administrasi Negara*, Surabaya: FH UNAIR
- Sutrisno, 2012, *Buku Pintar Wonogiri*, Wonogiri: Bagian Humas Kabupaten Wonogiri

### **Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan